



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIRECTOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWI SUPRIHATNO**
2. Jabatan : **DIRECTOR OF FINANCE & RISK MANAGEMENT**
3. NHK : **435529**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **4.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/64 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **428.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, MAZDA MAZDA6 ESTATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **30.000.000**

D. SURAT BERTAHAP Rp. **2.079.206.750**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **12.146.108.359**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **18.783.315.109**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

18.783.315.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.